

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

A. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Setda Provinsi Jawa Tengah**

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan serta memperhatikan persaingan yang ketat sebagai akibat arus globalisasi, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaan pembangunan yang terencana dalam renstra tersebut dapat menghasilkan kinerja yang sangat baik (*Excellence Performance*) dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya harmonisasi dan sinergitas hubungan kerja fungsional antar strata pemerintahan, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang pemerintahan umum daerah, pemerintahan desa, kelurahan dan kependudukan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban, serta administrasi penataan wilayah. Hal ini nampak masih sering terjadinya kebijakan dan program pembangunan tidak sinergis dan selaras antar strata pemerintahan.
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang otonomi daerah, administrasi pemerintahan, kerjasama dalam negeri, dan kerjasama luar negeri. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya daerah dalam pengelolaan potensi dan permasalahan daerah berjalan sendiri-sendiri, sehingga sering menimbulkan benturan kepentingan antar pemerintahan.

- 3) Belum optimalnya koordinasi tertib administrasi bidang hukum, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang perancangan dan penyusunan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota. Hal ini terlihat pada masih sering terjadinya temuan pelanggaran administrasi pemerintahan dan pembangunan karena tidak adanya kesadaran dan kepatuhan untuk berpedoman pada koridor hukum yang berlaku.
- 4) Masih belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi tertib administrasi pembangunan daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah daerah bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya para pelaku pembangunan yang kurang memahami dan mentaati terhadap seluruh tahapan program dan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan. Sehingga berdampak pada *in-efisiensi* dan *in-efektivitas* hasil-hasil program dan kegiatan pembangunan.

- 5) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang perekonomian daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang peningkatan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sarana perekonomian, pengembangan investasi dan badan usaha milik pemerintah daerah (BUMD). Hal ini terlihat masih sering terjadinya pelaksanaan pembangunan bidang perekonomian berjalan kurang sinergis, karena lebih berorientasi pada ego sektoral masing-masing.

- 6) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas peningkatan sarana dan prasarana produksi daerah, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan energi dan sumber daya mineral . Hal ini terlihat masih sering terjadinya pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan produksi daerah belum berhasil secara optimal.

- 7) Masih belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan kesejahteraan sosial, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Hal ini terlihat masih sering terjadinya pelaksanaan pembangunan bidang sosial belum sinergis, sehingga berdampak pada hasil pembangunan bidang sosial belum optimal. Salah satu masalah sosial di Jawa Tengah yang harus mendapat perhatian adalah masih tingginya angka kemiskinan.

- 8) Masih belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan mental, dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang agama, kebudayaan dan kesenian, dan pendidikan, pemuda dan olah raga. Hal ini terlihat masih sering terjadinya pelaksanaan pembangunan bidang bina mental belum sinergis, sehingga berdampak pada belum optimalnya hasil pembangunan bidang bina mental.

- 9) Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kinerja aparatur dan pelayanan publik. Hal ini terlihat dari masih sering ditemukannya duplikasi pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD, masih banyaknya unit kerja yang miskin tugas dan pelayanan. Pelaksanaan program dan kegiatan belum berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Masih rendahnya etos kerja aparatur dan belum efektif dan efisiennya pelayanan publik dan ketatalaksanaan pemerintahan.
- 10) Belum maksimalnya kerja fungsional pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang anggaran, perbendaharaan, pengelolaan kas daerah, akuntansi, evaluasi dan pengendalian APBD Kabupaten/Kota. Hal ini terlihat masih sering ditemukannya kesalahan administrasi pengelolaan keuangan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan.
- 11) Masih belum maksimalnya kerja fungsional dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang publikasi, pengelolaan informasi, analisis media dan informasi. Hal ini terlihat pada masih banyaknya masyarakat kurang mengetahui terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan .

- 12) Belum optimalnya kinerja fungsional dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas-tugas pemerintah daerah bidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan, dan protokol.
- 13) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD, sehingga sering terjadi pelaksanaan tugas antar SKPD kurang sinergis, hal ini terjadi karena penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak terkoordinir dengan baik, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri.
- 14) Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masalah ini sebenarnya masalah klasik, banyak aparatur sering tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan yang dipegangnya, sehingga berakibat pada tidak optimalnya kinerja unit kerja bersangkutan.
- 15) Masih rendahnya disiplin dan budaya kerja Aparatur dalam melaksanakan tugas pengabdiaannya sebagai pelayan masyarakat. Hingga saat ini kesadaran aparatur akan tanggung jawab dan tuntutan kualitas pelaksanaan pekerjaannya belum menjadi kesadaran kolektif. Banyak dari Aparatur bekerja seadanya, tanpa mau tau tentang tanggung jawab yang diembannya.
- 16) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum guna optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah.

17) Masih kurangnya dukungan anggaran guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, beberapa program dan kegiatan tidak mendapatkan dukungan anggaran sesuai tuntutan target kinerja, sehingga akhirnya mempengaruhi pada kualitas capaian kinerja.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Sebagai rangkaian dari pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2013-2018, maka Gubernur Jawa Tengah terpilih telah menetapkan Visi dan Misi Gubernur sebagai berikut :

Visi : “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Adapun penjelasan visi tersebut mempunyai makna memiliki pemimpin yang mampu menggali semua potensi yang dimiliki kabupaten/kota serta mengelolanya dengan baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya secara mandiri. Yang pada hakekatnya merupakan peneguhan diri dan tekad untuk mewujudkan Jawa Tengah yang berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Jangkar idiologi tersebut pada mulanya digagas oleh Bung Karno dikenal sebagai ajaran Tri Sakti .

Posisi geopolitik dan geografis Jawa Tengah yang sangat strategis menuntutnya untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan

wilayah sekitarnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah sebagai pusatnya Jawa Tengah (*center of java*) .

Sangat relevanlah konsep ekonomi kerakyatan yang telah digagas oleh Bung Karno tersebut. Suatu sistem ekonomi berbasis pada kekuatan ekonomi yang ada pada diri rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, secara swasembada masyarakat mengelola segala sumber daya yang ada untuk dapat dimanfaatkan dan dikuasainya menjadi suatu materi yang berharga. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang ber azas pada kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral pancasila dan menunjukkan kesungguhan membela ekonomi rakyat.

Misi :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, yaitu : Berdaulat di bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi, & Berkepribadian di bidang Kebudayaan .
2. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran .
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur & transparan “mboten korupsi & mboten ngapusi”.
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan & kesatuan.

5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan & proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat .
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan & ramah lingkungan .

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah periode Tahun 2013-2018 tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah .

Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Gubernur periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab terhadap kualitas penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD maupun pemerintah kabupaten/kota ;
3. Bertanggungjawab terhadap kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;

4. Bertanggungjawab terhadap pembinaan administrasi dan aparaturn pemerintah daerah;
5. Bertanggungjawab terhadap tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Sementara itu hubungan langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Gubernur tersebut , Sekretariat Daerah terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke 3 (tiga) yaitu : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur & transparan “mboten korupsi & mboten ngapusi”.

Agar misi tersebut dapat terwujud, maka perlu ditindaklanjuti dalam operasionlisasi rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sebagai alat ukur untuk tercapainya hasil yang ingin diwujudkan tersebut.

Berikut ini disampaikan tabel mengenai keterkaitan Antara Visi dan Misi Gubernur dengan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah :

Tabel .III.1

Keterkaitan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah dengan Tugas dan Fungsi sekretariat Daerah Prov. Jawa Tengah

VISI GUBERNUR	MISI GUBERNUR	KETERKAITAN SETDA DENGAN VISI DAN MISI GUBERNUR
MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”	1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, yaitu : Berdaulat di bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi, & Berkepribadian di bidang Kebudayaan	Setda terkait langsung pada pelaksanaan misi ini, khususnya pada aspek manajemen keuangan daerah dan aspek pengendalian pembangunan .
	2. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran	Setda tidak terkait secara langsung terhadap pemenuhan misi ini, keterkaitannya pada perumusan kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial
	3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur & transparan “mboten korupsi & mboten ngapusi	Setda terkait langsung dengan Misi ini, khususnya pada mendorong tercapainya pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan .
	4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan & kesatuan	Setda tidak terkait secara langsung terhadap pelaksanaan Misi ini
	5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan & proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak	Setda tidak terkait secara langsung terhadap pelaksanaan misi ini
	6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat	Setda tidak terkait secara langsung terhadap pemenuhan misi ini
	7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan & ramah lingkungan	Setda tidak terkait secara langsung terhadap pelaksanaan misi ini

Selanjutnya mendasarkan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, maka dirumuskan 11 (sebelas) Program Unggulan sebagai jabaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya, yaitu:

1. Pendidikan Politik Masyarakat;
2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi;
3. Memperkuat Sistem Pelayanan Publik;
4. Mewujudkan Desa Mandiri;
5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
6. Rakyat Sehat;
7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah;
8. Meningkatkan Keadilan Gender;
9. Pembangunan Infrastruktur;
10. Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-Royo;
11. Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.

Adapun hubungan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah terkait langsung dengan keberhasilan pelaksanaan Program ke -2 yaitu : **Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi** .

C. **Telaahan Renstra K/L yang sejenis**

Beberapa hal yang terkait target capaian program pemerintah pusat yang perlu didukung oleh pemerintah daerah, dalam hal ini terkait dengan target-target capaian kinerja terkait dengan Sekretariat Daerah diantaranya adalah :

- a. Program Reformasi Birokrasi, program ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di pemerintah pusat dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara itu di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah. Program Reformasi Birokrasi, Sasaran Strategisnya diarahkan untuk : Meningkatnya Pelayanan Publik, Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan, Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan, Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, Meningkatnya Akuntabilitas, Perbaikan bidang Pengawasan , Meningkatnya Budaya Kerja/ Etika Birokrasi.
- b. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, program ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka

Menengah Tahun 2012-2014. Pelaksanaan program ini secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk pengkoordinasian di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara itu untuk pelaksanaan di lingkungan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikoordinasikan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah : Meningkatnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Meningkatnya transparansi pengelolaan anggaran, Meningkatnya transparansi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatnya transparansi pengadaan barang dan jasa.

D. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis.**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) . Senantisa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung **tidak terdapat hubungan cukup**

signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusannya kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

E. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor-faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, telaah terhadap visi dan misi Gubernur serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis, maka Isu-Isu Strategis di lingkungan Sekretariat Daerah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan untuk penyelesaian 5 (lima) tahun ke depan meliputi :

- a. Belum optimalnya sinergitas dan kinerja pelaksanaan tugas bidang pemerintahan daerah.
- b. Belum optimalnya sinergitas dan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan daerah bidang otonomi daerah dan kerjasama.
- c. Belum optimalnya tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d. Belum optimalnya tertib administrasi pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Belum stabil dan mantapnya struktur perekonomian daerah
- f. Belum memadainya sarana dan prasarana produksi penunjang perekonomian.

- g. Belum optimalnya upaya peningkatan pembinaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
- h. Belum optimalnya upaya peningkatan pembinaan mental masyarakat.
- i. Belum efektif, efisien dan akuntabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- j. Belum efektif, efisien dan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- k. Belum optimalnya pelaksanaan publikasi dan kehumasan dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat .
- l. Belum optimalnya pelaksanaan tugas bidang umum khususnya terkait dengan bidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan, dan protokol dalam rangka menunjang kinerja pimpinan .